

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Studi ini menarik untuk dikaji karena adanya beberapa kesamaan diantara presiden-presiden Indonesia. Akan tetapi, studi ini akan lebih menfokuskan untuk membahas tentang perbandingan kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih dikenal dengan sebutan SBY merupakan presiden Indonesia keenam yang terpilih sebagai presiden melalui pemilihan umum presiden secara langsung pada tahun 2004 dengan wakilnya Jusuf Kalla. Sedangkan Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan panggilan Jokowi merupakan presiden Indonesia ketujuh yang terpilih sebagai presiden melalui pemilihan umum presiden secara langsung pada tahun 2014 dengan wakilnya Jusuf Kalla. Pada pemilihan umum presiden tahun 2009, Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih sebagai presiden Indonesia dengan wakil yang berbeda yakni Boediono. Salah satu kesamaan antara kedua presiden ini yaitu adalah merupakan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia di era reformasi.

Kesamaan lain antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo adalah kedua pemimpin ini memiliki wakil yang sama, yaitu Jusuf Kalla. Pada pemilu presiden tahun 2004 periode pertama Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden, wakil dari beliau adalah Jusuf Kalla. Akan tetapi pada pemilu presiden 2009, Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan

Boediono yang mana pada waktu itu Jusuf Kalla juga mencalonkan diri sebagai calon presiden. Namun, pemilu presiden dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Munculnya nama Joko Widodo sebagai calon presiden dalam pemilu tahun 2014, menjadikan Jusuf Kalla kembali hadir dalam ranah politik pemerintahan Indonesia. Yang pada akhirnya pada pemilu presiden tahun 2014 terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden Indonesia dengan wakilnya Jusuf Kalla.

Dalam pilpres tahun 2004 terdapat lima pasangan yang maju saat itu, antara lain: Megawati Soekarnoputri dan Ahmad Hasyim Muzadi, Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo, Wiranto dan Salahuddin, Hamzah Haz dan Agum Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Pada putaran pertama SBY-JK unggul dengan memperoleh suara 33,58 % dengan nomor dua ada pasangan Megawati-Hasyim dengan memperoleh suara 28,18 %. Karena tidak adanya pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dalam putaran pertama, maka kedua pasangan yang memperoleh suara tertinggi kemudian bertarung pada putaran kedua. Dalam putaran kedua diperoleh hasil, pasangan SBY-JK memperoleh sebanyak 60,62% suara sedangkan pasangan Megawati-Hasyim memperoleh 39,38% suara (DetikNews.com, 2014).

Berbeda dengan tahun 2004, pada pilpres tahun 2014 hanya terdapat dua pasangan calon saja yang maju dalam pilpres. Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Pasangan Jokowi-JK unggul dengan memperoleh suara 53,15% sedangkan pasangan Prabowo-Hatta memperoleh

suara 46,85%. Kesamaan lain antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo yaitu adalah presiden yang mendapatkan perolehan suara diatas 50% suara. Walaupun pada pilpres tahun 2004 pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla mendapatkan perolehan suara mencapai 60,62%, akan tetapi angka tertinggi diraih adalah pada pilpres tahun 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono memperoleh suara sebanyak 73,87% suara. Hingga saat ini angka ini masih menjadi angka tertinggi dalam pilpres di Indonesia, berdasarkan peningkatan perolehan suara yang diperoleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pilpres tahun 2004 dan 2009 artinya beliau mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat Indonesia. (DetikNews.com, 2014).

Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono menganut paham *A Million Friends Zero Enemy* dalam artian merangkul sebanyak-banyaknya teman dan meminimalisir adanya permusuhan. Dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia aktif dalam berbagai organisasi internasional hingga konverensi tingkat dunia. Dengan pembuktian antara lain menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA GAMES XXIV di Palembang pada tahun 2011 dan sebagai tuan rumah perhelatan Miss World 2013 di Bali pada tahun 2013. Kesamaan lain antara kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo adalah di era kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia juga berperan aktif dalam organisasi internasional. Beliau berhasil mengenalkan kembali nama Indonesia dikanca internasional. Indonesia kembali menjadi tuan

rumah penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII di Palembang dan Jakarta pada Agustus 2018 (Sikumbang, 2015).

Sebagaimana tujuan negara Indonesia yang dimuat dalam UUD 1945 yaitu adalah ikut berperan aktif dalam perdamaian dunia dan penyelesaian konflik. Dibawah kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia terlibat dan berperan aktif dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan. Indonesia berperan sebagai tonggak atau motor, penggagas dan menjadi salah satu jembatan dari terbentuknya forum-forum yang diadakan oleh ASEAN. Forum ini dibentuk dengan memiliki tujuan agar konflik yang terjadi dapat mereda dan akan munculnya suatu solusi penyelesaian terhadap konflik tersebut (Saragih, 2018). Kesamaan lain antara kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, yaitu adalah Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan penyelesaian konflik. Kebijakan yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam membantu penyelesaian konflik etnis Rohingya dan etnis Rakhine di Myanmar. Kebijakan yang diambil oleh Susilo Bambang Yudhoyono lebih mengedepankan kepada metode penyelesaian konflik secara damai yang dilakukan dengan cara kerja sama, dan tetap memegang prinsip non intervensi. Penyelesaian konflik dilakukan secara bilateral maupun multilateral bersama OKI dan ASEAN (Ardani, 2015).

Perjalanan karir Joko Widodo dimulai sejak tahun 2005 dimana kali pertama Joko Widodo terjun ke dunia politik. Joko Widodo diusung dari partai PDIP sebagai calon Walikota Surakarta, dan Joko Widodo lahir sebagai

pemenang dalam pemilihan tersebut. Banyaknya prestasi yang diraih oleh Joko Widodo selama menjabat sebagai Walikota Surakarta menjadikan Joko Widodo diajukan untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Pada akhirnya Joko Widodo pun terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tak cukup sampai disitu, semakin terkenalnya Joko Widodo dengan berbagai macam prestasi yang telah diraih akhirnya menjadikan Joko Widodo sebagai salah satu calon presiden dalam pemilu tahun 2014. Dalam pemilu presiden 2014 Joko Widodo terpilih sebagai presiden Indonesia dengan wakilnya Jusuf Kalla, dimana pasangan Jokowi-JK mampu mengalahkan lawannya yakni Prabowo dan Hatta Rajasa (Dyah Ratri Ismi, Helly P. Soetjipto, dan Sri Respati Andamari, 2013).

Perjalanan karir Susilo Bambang Yudhoyono dimulai sejak tahun 1973. Susilo Bambang Yudhoyono menjadi lulusan terbaik AKABRI Darat, mengabdikan sebagai perwira TNI selama 27 tahun. Tahun 2000, Susilo Bambang Yudhoyono meraih pangkat Jenderal TNI. Sebelum menjadi presiden, Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi serta Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan pada Kabinet Persatuan Nasional di era presiden KH. Abdurrahman Wahid. Selain itu Susilo Bambang Yudhoyono juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada Kabinet Gotong Royong di era presiden Megawati Soekarnoputri. Pada pemilu presiden 2004, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden Indonesia dengan wakilnya Jusuf Kalla. Pada pemilu presiden 2009, Susilo Bambang Yudhoyono

kembali terpilih sebagai presiden Indonesia dengan Boediono sebagai wakilnya (Ainun, 2014).

Persamaan lain antara kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo adalah dimana Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo sama-sama menerapkan dan mengadakan program-program yang pro terhadap rakyat. Program yang diterapkan oleh Joko Widodo antara lain: Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sedangkan untuk program-program yang diterapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono antara lain: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa, Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM (Suryawati, 2014).

Berawal dari adanya beberapa kesamaan antara kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo inilah yang pada akhirnya membuat penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana perbandingan gaya kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam perspektif kepemimpinan demokratis, serta untuk melengkapi hasil dari penelitian sebelumnya yang serupa dengan topik yang sama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan gaya kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam perspektif kepemimpinan demokratis ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan gaya kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam perspektif kepemimpinan demokratis.
2. Secara akademis untuk menambah wawasan bidang pengetahuan mengenai masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.
3. Secara teoritis untuk dapat memberikan referensi penelitian selanjutnya dengan penelitian yang sama atau sejenis.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut (Sari, 2016) dalam penelitian “Reformasi Birokrasi Di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014”. Birokrasi yang dimaksud adalah kabinet kerja yang dibentuk oleh SBY untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahan Indonesia. Namun, birokrasi ini mengalami suatu perombakan. Perombakan kabinet ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh SBY dengan tujuan untuk memulihkan dan menstabilkan kondisi Indonesia, serta meninjau kembali kinerja dari bawahan agar jauh lebih baik dari sebelumnya. Kabinet kerja yang dibentuk oleh SBY ini yang nantinya akan menjalankan roda pemerintahan Indonesia serta akan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan baik didalam negeri maupun luar negeri.

Menurut (Sutiknyo, 2013) dalam penelitian “Kebijakan Politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Terhadap Kasus KPK Vs POLRI Dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus Susno Duaji dan Bibit Chandra)”. Adapun langkah atau kebijakan yang diambil oleh SBY untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi pada internal penegak hukum di Indonesia yaitu kasus permusuhan antara KPK dengan institusi POLRI. Menfokuskan kepada aspek siasat dan intrik politik yang dilakukan oleh elite politik pemerintahan Indonesia untuk melakukan lobi-lobi yang akan saling memberikan dukungan antara satu dengan yang lainnya. Kebijakan yang dilakukan oleh SBY adalah bersikap netral tanpa memihak kepada salah satu pihak yang sedang bersengketa diantara institusi penegak hukum Indonesia. Akan tetapi, juga tidak lepas tangan dengan membiarkan kegaduhan terus berlanjut.

Menurut (Saleh, 2005) dalam penelitian “Kebijakan Pemerintahan SBY-JK Tentang Kenaikan Harga BBM 01 Oktober 2005”. Upaya untuk mengatasi dampak yang terjadi, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru sebagai kompensasi atas kenaikan dari harga BBM dengan melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Walaupun di lapangannya kebijakan ini belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Terdapat kritikan terhadap program BLT adalah suatu program yang tidak terencana dengan baik dan terkesan hanya untuk meredam gejolak yang terjadi sesaat. Pernyataan ini muncul dikarenakan dengan melihat substansi dari pemberian BLT yang

ternyata tidak tepat sasaran, mengingat banyaknya kendala-kendala teknis yang terjadi dilapangan oleh para pelaksana pendistribusian dana BLT.

Menurut (Salma Nisrina dan Nila Nurlimah, 2017) dalam penelitian “Model Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dalam Bingkai Buku “Harus Bisa, Seni Memimpin Ala SBY”. SBY memiliki tipe kepemimpinan yang kontigensi. Hal ini dibuktikan dan didukung dengan adanya dua faktor penting, yaitu gaya yang berorientasi dengan tugas dan gaya yang berorientasi dengan hubungan. SBY melihat situasi berdasarkan hubungan pemimpin dan anggota dengan struktur tugas. SBY adalah salah satu pemimpin yang sukses, SBY mampu menjalankan pemerintahan negara selama dua periode. Seperti halnya yang dituliskan Dr. Dino Patti Djalal dalam bukunya “Untuk Mengetahui Bagaimana Keharusan Pemimpin Dalam Negara Indonesia”, beliau menjelaskan bahwa sikap, sifat, serta cara kepemimpinan SBY adalah salah satu gaya kepemimpinan yang cocok diterapkan di Indonesia. SBY memiliki kepribadian yang tegas, pemikir, detail, dan teliti dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan siap membuat solusi dan keputusan.

Menurut (M.Y Tiyas Tinov dan Baskoro Wicaksono, 2015) dalam penelitian “Gaya Komunikasi Politik Presiden Joko Widodo dalam Menyikapi Isu-Isu Kebijakan Publik Melalui Media Massa”. Gaya komunikasi yang digunakan oleh presiden Jokowi lebih kepada menggunakan gaya *low context communication* saat memberikan suatu informasi kepada masyarakat dengan menyesuaikan kultur dan budaya dari masyarakat setempat. Akan tetapi tak

jarang informasi yang disampaikan berbeda dengan para ajudannya, antara lain menteri ataupun pejabat setingkat menteri atau pejabat eselon I kementerian yang kerap kali menimbulkan perbedaan. Maka dari itu membentuk tim komunikasi politik untuk dapat membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Menurut (Rahman, 2009) dalam penelitian “Politik Luar Negeri Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Terhadap Eropa”. Politik luar negeri dibawah kepemimpinan SBY terkendala oleh karakteristik domestik, Eropa bukan prioritas utama pada politik luar negeri Indonesia dibawah kepemimpinan SBY. Dua hal yang menjadi kendala. Pertama, dikarenakan letak geografis Eropa yang sangat jauh dari Asia Tenggara menjadikan kendala besar dalam pengembangan hubungan bilateral dengan negara-negara Eropa. Kedua, tingkat kerja sama antara negara-negara Eropa memperlihatkan kemajuan ekonomi dan politik yang jauh lebih maju dan lebih mendalam jika dibandingkan dengan tingkat kerja sama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara sehingga mempersulit pola hubungan bilateral antara Indonesia dan Eropa.

Menurut (Saputra, 2011) dalam penelitian “Politik Luar Negeri Indonesia Dibawah Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2009-2011”. Pola politik luar negeri Indonesia dibawah kepemimpinan SBY akan diwujudkan dalam empat hal. Pertama, secara normatif politik luar negeri Indonesia akan tetap berpegang teguh kepada prinsip bebas aktif serta merangkul negara-negara *major powers* dan *regional powers* di Asia Pasifik pada ikatan *comprehensive partnership* dan

strategic partnership. Kedua, Indonesia akan tetap menjadikan ASEAN sebagai pilar utama dalam politik luar negeri dan pembentukan tatanan regional. Ketiga, dengan memanfaatkan forum kerjasama G-20 sebagai sarana untuk mengatasi krisis finansial global. Keempat, menjadikan *Bali Democracy Forum* sebagai sarana untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi kepada negara-negara lain.

Menurut (Situmorang, 2014) dalam penelitian “Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Jokowi-JK”. Secara normatif dan juga konseptual politik luar negeri Jokowi-JK tetap sesuai dan sejalan dengan prinsip bebas aktif juga tujuan dari politik luar negeri Indonesia. Akan tetapi, adanya beberapa ketidaksesuaian antara visi dan misi dengan prioritas program untuk beberapa bidang. Salah satunya adalah relevansi dari status *middle power* dan mandala Indo-Pasifik dengan potensi ancaman dan tantangan akan keamanan dan perdamaian dunia. Prioritas yang direncanakan Tantangan lainnya adalah keterlibatan dari peran serta masyarakat yang memerlukan atas pengaturan-pengaturan yang lebih seksama.

Menurut (Amaliyah, 2015) dalam penelitian “Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Presiden Jokowi”. Politik luar negeri Indonesia didasarkan pada prinsip kemandirian yang didasarkan pada paham yakni berdaulat pada bidang politik, berdikari pada bidang ekonomi serta berkepribadian pada kebudayaan. Adanya tantangan yang dihadapi Indonesia dalam politik luar negeri Indonesia lebih kepada bersifat internal maupun eksternal. Terlebih lagi untuk dapat menetapkan keputusan yang mana menjadi

prioritas-prioritas utama agar kepentingan Indonesia dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia.

Menurut (Ardani, 2015) dalam penelitian “Kebijakan Indonesia Dalam Membantu Penyelesaian Konflik Antara Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine Di Myanmar (Studi Karakter Kepribadian Susilo Bambang Yudhoyono)”. Kebijakan yang diambil SBY dalam membantu penyelesaian konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine di Myanmar, kebijakan yang dilakukan lebih mengedepankan metode penyelesaian konflik secara damai yang dilakukan dengan cara *soft power* diplomasi, dan tetap memegang prinsip non intervensi. Selain itu kebijakan yang dilakukan untuk membantu penyelesaian konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine di Myanmar dilakukan secara bilateral ataupun multilateral bersama OKI dan ASEAN. Kebijakan yang dibuat oleh SBY lebih bersifat kepada *problem solving*.

Menurut (Inayati, 2009) dalam penelitian “Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia”. Kebijakan pemerintah dalam menghadapi dinamika politik yang berkembang didalam negeri dirasa masih kurang, dimana pemerintah sering dianggap terlalu campur tangan dan melakukan rekayasa politik sehingga terkesan membodohi dan mengekang masyarakat. Menghadapi dinamika politik dari luar negeri, yang masih perlu dibenahi antara lain adalah kualitas aktor politik (diplomat) dan masih kurangnya aktor non pemerintah yang terlibat dalam hubungan luar negeri. Disamping itu, kegiatan diplomasi dirasa masih kurang intensif dan

kurang terpadu dalam kepentingan aspek lain (politik, ekonomi, sosial-budaya, ideologi, dan keamanan) sehingga kurang maksimal dalam mendukung keberhasilan politik luar negeri Indonesia.

Menurut (Saragih, 2018) dalam penelitian “Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Konflik Laut Cina Selatan”. Dalam strategi yang diambil Indonesia membuat pangkalan militer yang dijadikan landasan di kepulauan natuna yang letaknya bersebrangan dengan laut cina selatan. Yang menjadi fokus utama adalah strategi udara sebagai penangkal jika terjadinya aksi militer di kepulauan natuna. Pasalnya Indonesia juga membawa kepentingan nasional yakni sebagai jembatan atas aktor yang terjun secara langsung dalam konflik laut cina selatan. Sebagaimana dalam UUD 1945 dalam salah satu isinya yakni adalah berperan aktif di dalam perdamaian dunia dan penyelesaian konflik.

Menurut (Rosyidin, 2014) dalam penelitian “*Soft Diplomacy* SBY Dalam Konflik Indonesia-Malaysia: Studi Kebijakan SBY Terhadap Pelanggaran Kedaulatan Oleh Malaysia Di Perairan Bintan Tahun 2010”. Kebijakan luar negeri SBY terhadap Malaysia merupakan mispersepsi SBY terhadap sikap dan tindakan negara lain. SBY tidak melihat permasalahan secara objektif melainkan lebih kepada subjektif. Adanya suatu resiko yang sangat besar dibalik keputusan tersebut. Kepentingan ini tidak hanya sekedar kepentingan strategi dalam jangka pendek seperti halnya kepentingan ekonomi ataupun alasan moral sebagai saudara satu rumpun. Melainkan konseskuensi dari pengambilan kebijakan dalam

situasi konfliktual yaitu kebijakan luar negeri yang irasional, suatu kebijakan yang akan berpotensi merugikan negara tersebut.

Menurut (A. Irawan J.H dan Giandi Kartasasmita , 2015) dalam penelitian “Diplomasi Komersial Indonesia Ke Belanda Masa Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)”. Diplomasi komersial Indonesia dan Belanda dengan tujuan pengembangan lebih jauh lagi perdagangan dan investasi antar kedua negara. Investasi terutama dilakukan oleh perusahaan Belanda ke Indonesia, sedangkan perdagangan secara dua arah. Selain RPJMN, MP3EI adalah salah satu strategi yang relevan untuk digunakan sebagai penangan bagi diplomasi komersial Indonesia ke Belanda. Hal ini dikarenakan MP3EI memberikan arahan untuk investasi luar negeri, termasuk dari Belanda, dalam hal produk dan lokal investasi di Indonesia. MP3EI sekaligus memuat informasi tentang lokasi sumber-sumber ekspor Indonesia.

Menurut (Aini, 2015) dalam penelitian “Peran *Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association (PASIAD)* Dalam Mempererat Hubungan Bilateral Turki-Indonesia Era Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Tahun 2004-2014”. *Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association (PASIAD)* merupakan sebuah *Non Governmental Organization (NGO)* milik Turki yang berfokus dalam bidang pendidikan. PASIAD berperan dalam diplomasi kebudayaan melalui bidang pendidikan dengan cara membuka kerja sama antara PASIAD dengan lembaga-lembaga pendidikan dan yayasan-yayasan yang berhubungan dengan pendidikan yang

ada di Indonesia. PASIAD mendirikan sekolah bertaraf internasional dengan sistem yang profesional. PASIAD memiliki program tahunan yaitu pertukaran pelajar Turki-Indonesia, studi banding pendidikan dan pelatihan guru serta pengirimana duta olimpiade. Dengan keberhasilan dari PASIAD inilah Turki menjadi negara yang dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan yang baik dan bermoral.

Menurut (Suryawati, 2014) dalam penelitian “Implementasi Kebijakan Joko Widodo Melalui Program KJS dan KJP (Ditinjau dari Perspektif Komunikasi Pembangunan)”. Kebijakan yang diambil oleh presiden Jokowi mendapatkan respon positif dari masyarakat Indonesia, baik dari masyarakat yang sudah mendapatkan KJS dan KJP ataupun masyarakat yang belum mendapatkan. Dalam tahun pertama kebijakan ini belum sepenuhnya menyentuh masyarakat miskin di Jakarta. Faktor utama yang menjadi penghambat atau kendala adalah terkait dengan kepemilikan KTP dan KK dari warga miskin di Jakarta.

Menurut (Utami, 2013) dalam penelitian “Gaya Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Kepemimpinan Yang Baik”. Konsep dari GCG sendiri akan cocok jika diterapkan dalam lingkungan birokrasi pemerintahan, sektor swasta atau perusahaan swasta, dan lain sebagainya. Konsep GCG memiliki tujuan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang bersih. Dalam kepemimpinannya Jokowi menerapkan konsep GCG secara sungguh-sungguh. Konsep GCG yang

diterapkan antara lain *elemen participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, and strategic vision.*

Menurut (Dyah Ratri Ismi, Helly P. Soetjipto, dan Sri Respati Andamari, 2013) dalam penelitian “Jokowi Membangun Solo: Studi Kasus Atas Gaya Kepemimpinan Walikota Solo Dalam Proses Relokasi Pedagang Kaki Lima Monumen 45 Banjarsari Surakarta”. Gaya kepemimpinan yang digunakan adalah merakyat dimana dalam menempatkan diri sebagai pemimpin yang menjadi bagian dari masyarakat. Selain itu Jokowi juga menempatkan diri sebagai pemimpin yang menghargai rakyatnya baik secara individu ataupun kelompok komunitasnya. Tidak hanya itu Jokowi juga memberikan perhatian dan juga mengayomi rakyatnya, dibuktikan dengan Jokowi mampu membuat suatu rencana dan memperkirakan suatu resiko yang baik dan juga resiko yang buruk yang akan dihadapi nantinya.

Menurut (A.R, 2013) dalam penelitian “Penomena Kepemimpinan Politik Jokowi”. Kepemimpinan transformasional yang diterapkan oleh Jokowi dapat dilihat atas kemampuan dari sosok Jokowi sendiri yang dimana membawa birokrasi pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan terhadap masyarakat. Dalam usaha mendapatkan jabatan politik, Jokowi melalui kompetisi yang diraih dengan melalui cara-cara yang legal dan bersih atas dari politik uang. Walaupun dengan kemenangan Jokowi telah mengalahkan lawannya, namun Jokowi tetap menggunakan kekuasaan bukan untuk

mempertahankan kekuasaannya itu sendiri, melainkan digunakan untuk tetap melayani rakyat dan masyarakat.

Menurut (Wulandari, 2016) dalam penelitian “Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla Menurut Kacamata 5 Media Massa di Indonesia”. Adanya kelemahan diantara keduanya dalam mengkoordinasi kabinet yang pada akhirnya melibatkan beberapa menteri justru saling beradu argumen juga pendapat. Pada lain sisi, terdapat juga permasalahan dari pemerintahan sebelumnya yang menjadikan PR bagi pemerintahan yang sekarang. Selain itu faktor dari pengaruh situasi dan kondisi eksternal juga tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Situasi global yang tidak stabil juga menjadi faktor yang menghambat.

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

Kepemimpinan Jokowi Dalam Ranah Domestik			
No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Dyah Ratri Ismi Hayuningtyas dkk (2013)	Jokowi Membangun Solo: Studi Kasus Atas Gaya Kepemimpinan Walikota Solo Dalam Proses Relokasi Pedang Kaki Lima Monumen 45 Banjarsari Surakarta	Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Jokowi adalah dengan menggunakan metode pendekatan dengan para pedang kaki lima. Selain itu Jokowi tetap memperhatikan dari sisi aspek psikologis dimana tetap memberikan rasa aman dan meningkatkan <i>self esteem</i> pedagang kaki lima.
2.	M. Yusuf A.R (2013)	Fenomena Kepemimpinan Politik Jokowi	Kepemimpinan Jokowi memiliki karakter <i>intellectual stimulation</i> hal ini dapat dilihat dari kemampuan seorang Jokowi dalam upaya mendorong bawahannya untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dan tanggungjawab dengan

			cepat, cermat serta rasional. Walaupun Jokowi menjanjikan terhadap suatu perbaikan, akan tetapi Jokowi juga mengajak masyarakat untuk berfikir secara rasional.
3.	Theresia D. Wulandari (2016)	Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla Menurut Kacamata 5 Media Massa di Indonesia	Adanya permasalahan dan persoalan yang belum terselesaikan dari pemerintahan sebelumnya. Di lain sisi faktor dari pengaruh eksternal juga merupakan salah satu penghambat karena tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Jokowi dan Jusuf Kalla memiliki visi dan misi yang baik
4.	Sulistyo Seti Utami (2013)	Gaya Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (GCG)	Dalam penerapan konsep GCG, Jokowi tetap menggunakan pedoman dari GCG. Pedoman-pedoman tersebut terdiri atas <i>element participation, rule of law, transparency, respomsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiviness, accountability and strategic vision.</i>
5.	Indah Suryawati (2014)	Implementasi Kebijakan Joko Widodo Melalui Program KJS dan KJP (Ditinjau dari Perspektif Komunikasi Pembangunan)	Yang menjadi salah satu permasalahan adalah persyaratan yang sulit dipenuhi oleh masyarakat miskin di Jakarta adalah persoalan dari atas kepemilikan KTP dan KK. Walaupun pada awal tahun 2014 terdapat kebijakan atas pengurusan KTP secara Gratis, akan tetapi kebijakan tersebut belum dapat dilaksanakan secara merata oleh pemerintah setempat.
6.	M. Y Tiyas Tinov dan Baskoro	Gaya Kepemimpinan Politik Presiden Joko Widodo dalam	Jokowi menerapkan gaya kepemimpinan pada pola <i>low context communication</i> . Dalam

	Wicaksono (2015)	Menyikapi Kebijakan Melalui Massa Isu-Isu Publik Media	memberikan suatu informasi kepada masyarakat akan menyesuaikan sesuai dengan kultur dan budaya dari masyarakat setempat. Tipe komunikasi ini dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat akan tetapi pada sisi lain dapat memunculkan <i>statement</i> pencitraan semata.
Kepemimpinan Jokowi Dalam Ranah Internasional			
7.	Hendra Maujana Saragih (2018)	Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Konflik Laut Cina Selatan	Diplomasi Indonesia dalam aspek negara, strategi yang digunakan Indonesia adalah dimana Indonesia berperan sebagai motor dan juga salah satu penggagas atas terbukanya kerjasama multilateral antara negara-negara yang terlibat aktif dalam penyelesaian konflik laut cina selatan.
8.	Nur Amaliyah (2015)	Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Presiden Jokowi	Politik luar negeri Indonesia yang diterapkan berdasarkan pada prinsip kemandirian yang dikenal dengan istilah TriSakti yaitu adalah berdaulat di dalam bidang perpolitikan, berdikari di dalam bidang perekonomian dan berkepribadian dalam kebudayaan.
9.	Mangadar Situmorang (2014))	Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Jokowi-JK	Dalam pola yang bersifat pada individualis dimana penilaian, persepsi, kepribadian bahkan gaya kepemimpinan akan mempengaruhi dari kinerja politik luar negeri Indonesia. Maka dari itu kebijakan luar negeri Indonesia akan lebih diprioritaskan pada penguatan internal atau dalam dan akan menjadi kecenderungan utama untuk politik luar negeri

			Indonesia lima tahun kedepan.
Kepemimpinan SBY Dalam Ranah Domestik			
10.	Novita Sari (2016)	Reformasi Birokrasi Di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014	Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh SBY pada periode dua antara lain: intruksi penyusunan LHKPN (laporan harta kekayaan pejabat negara), penerapan <i>e-procurement</i> pada pengadaan barang jasa pemerintah, penerapan <i>e-government</i> , penerapan anggaran berbasis kinerja, dan promosi jabatan secara terbuka.
11.	Muhammad Hairul Saleh (2005)	Kebijakan Pemerintahan SBY-JK Tentang Kenaikan Harga BBM 01 Oktober 2005	Kebijakan ini merupakan bentuk implementasi dari kebijakan pada bidang ekonomi. Pemerintah telah melakukan penelitian yang mendalam sebelum kebijakan ini diambil, akan tetapi fakta dilapangannya terjadi dampak yang cukup signifikan. Dampak yang paling dirasakan adalah dampak ekonomi, sosial serta politik.
12.	Sutiknyo (2013)	Kebijakan Politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Terhadap Kasus KPK Vs POLRI Dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus Susno Duadji dan Bibit Chandra	Upaya yang dilakukan SBY dalam penanganan kasus ini adalah dengan mengambil kebijakan deponering. Hal ini terjadi karena lambatnya penanganan kasus yang terjadi, sehingga SBY turun tangan untuk merespon permasalahan yang ada. Walaupun permasalahan ini dapat diselesaikan, akan lebih baik jika pihak KPK dan POLRI bisa bekerja sama untuk menghentikan permasalahan yang terjadi.
13.	Salma Nisrina dan Nila	Model Kepemimpinan Susilo Bambang	SBY menjadi salah satu pemimpin yang disegani. SBY tipe pemimpin yang tegas,

	Nurlimah (2017)	Yudhoyono (SBY) Dalam Bingkai Buku “Harus Bisa, Seni Memimpin Ala SBY”	detail dan juga pemikir yang mana dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada akan siap membuat solusi dan keputusan. Seorang pemimpin yang percaya diri, akan dapat membantu seseorang untuk terus maju kedepan meskipun dengan berbagai tantangan.
Kepemimpinan SBY Dalam Ranah Internasional			
14.	Thaibatul Aini (2015)	Peran <i>Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association</i> (PASIAD) Dalam Mempererat Hubungan Bilateral Turki-Indonesia Era Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Tahun 2004-2014”.	PASIAD menjadi salah satu sarana penting untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan Turki. Dalam bidang sosial dengan melalui beberapa kegiatan yang dilakukan, diantaranya bantuan korban bencana alam, bantuan anak yatim, pembagian sembako kepada kaum duafa, dan lainnya. Sedangkan bidang kebudayaan yaitu melalui budaya-budaya Turki dipelajari oleh siswa Indonesia sehingga persebaran budaya dan bahasa Turki semakin luas dan di akui oleh dunia.
15.	Ratna Shofi Inayati (2009)	Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia	Secara umum pemerintah Indonesia telah memahami <i>trend</i> yang akan kemungkinan terjadi pada masa depan. Hal demikian dapat dilihat berdasarkan melalui strategis, intropeksi dan aktualisasi terhadap kegiatan politik, kebijakan serta langkah yang diambil dalam menghadapi dari setiap permasalahan politik baik secara nasional maupun internasional.
16.	A.Irawan dan Giandi Kartasmita (2015)	Diplomasi Komersial Indonesia Ke Belanda Masa Kepemimpinan	Diplomasi komersial Belanda ke Indonesia dengan tujuan cakupan yang lebih sempit. Sedangkan diplomasi

		Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)	Indonesia ke Belanda lebih bersifat umum, sehingga sering terjadi tumpang tindih antar kementerian atau organ negara lainnya. Hal ini merupakan tantangan yang senantiasa harus diperbaiki.
17.	Mohammad Rosyidin (2014)	<i>Soft Diplomacy</i> SBY Dalam Konflik Indonesia-Malaysia: Studi Kebijakan SBY Terhadap Pelanggaran Kedaulatan Oleh Malaysia di Perairan Bintan Tahun 2010	<i>Soft power</i> yang dilakukan SBY dirasa kurang relevan untuk kebijakan terhadap pelanggaran yang dilakukan Malaysia. Pasalnya SBY menggunakan pendekatan diplomatik melalui dialog untuk meredam ketegangan antara dua negara.
18.	Fatma Arya Ardani (2015)	Kebijakan Indonesia Dalam Membantu Penyelesaian Konflik Antara Entis Rohingya dan Etnis Rakhine Di Myanmar (Studi Karakter Kepribadian Susilo Bambang Yudhoyono)	SBY membawa Indonesia lebih aktif dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dalam upaya penyelesaian konflik yang dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral bersama OKI dan juga ASEAN. Kebijakan yang dilakukan SBY dalam penyelesaian konflik Rohingya dan Rakhine lebih pada <i>problem solving</i> .
19.	Andhik Beni Saputra (2011)	Politik Luar Negeri Indonesia Dibawah Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2009-2011	Pada ranah internasional, Indonesia dihadapkan pada dua tantangan. Pertama, adanya perubahan kekuatan di negara-negara besar dari sistem unipolar menuju multipolar. Kedua, adanya krisis ekonomi global yang berdampak luas kepada perekonomian dunia.
20.	Agus R. Rahman (2009)	Politik Luar Negeri Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Terhadap Eropa	Politik luar negeri dibawah kepemimpinan SBY berorientasi pada peran, tujuan dan tindakan yang terbatas. Jejak perhatiannya kepada Eropa sebagai salah satu

			diantara kawasan yang potensial dan berpengaruh pada hubungan internasional menjadi tidak optimal.
--	--	--	--

Diolah oleh penulis

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian yang diambil oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada bagaimana perbandingan gaya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Tinjauan diatas lebih berfokus kepada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kedua pemimpin ini, baik secara ranah internasional maupun domestik. Selain itu terdapat beberapa tinjauan pustaka yang membahas tentang politik luar negeri Indonesia dimasa kepemimpinan kedua pemimpin ini.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi suatu kelompok yang terorganisasi demi terwujudnya tujuan bersama. Dalam pengertian lain, kepemimpinan adalah suatu fenomena kompleks yang melibatkan tiga hal utama yaitu pemimpin, pengikut, serta situasi. Kepemimpinan adalah salah satu faktor utama yang mendukung kesuksesan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan bersama. Kepemimpinan diklasifikasikan menjadi tiga yaitu kepemimpinan sebagai kelengkapan atau atribut dari suatu kedudukan, kepemimpinan sebagai karakteristik seseorang, dan kepemimpinan sebagai kategori perilaku.

Kepemimpinan merupakan pemimpin yang mengarahkan serta mempengaruhi kegiatan dari para anggota kelompok. Kepemimpinan dalam arti lain merupakan unsur yang fundamental dalam menghadapi gaya dan perilaku seseorang, hal tersebut memiliki tujuan untuk agar bawahan mampu serta mau patuh terhadap pimpinannya. Merupakan suatu hal yang fundamental jika seseorang pemimpin memiliki keterampilan untuk mempengaruhi orang yang dipimpinnya dalam mewujudkan kepemimpinan yang efektif (Mangkuprawira, 2009).

Kepemimpinan merupakan suatu pengarahan serta tindakan pemimpin yang sifatnya mempengaruhi tindakan bawahannya yang memiliki tujuan agar para bawahannya mau bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan berbagai definisi-definisi diatas dapat disimpulkan, kepemimpinan adalah suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku, pemikiran, serta sikap dari sekelompok orang baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa adanya paksaan dari pimpinan dan bawahan melakukannya secara sukarela demi terwujudnya tujuan bersama.

Menurut (Hasibuan, 2001) merumuskan pengertian kepemimpinan adalah sbagai berikut :

1. Kepemimpinan pada dasarnya menekankan adanya hubungan antara dua pihak, yaitu adanya pemimpin dan ada yang dipimpin atau pengikut.

2. Terjadinya pola interaksi diantara pemimpin dan yang dipimpin.
3. Pada pola interaksi yang terjadi antara pemimpin dengan yang dipimpin, pemimpin mempengaruhi perilaku para pengikut.
4. Proses pemimpin mempengaruhi pengikut dilakukan dengan tujuan agar pengikut melakukan tindakan-tindakan untuk mampu mencapai tujuan yang telah disepakati bersama oleh pemimpin dan pengikut.
5. Tujuan yang ingin dicapai oleh pemimpin dan pengikutnya merupakan tujuan bersama dari organisasi.

Berdasarkan kelima poin diatas, (Hasibuan, 2001) menyimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan pola interaksi yang terjadi antara pimpinan formal dengan para pengikutnya atau bawahannya untuk melakukan tindakan-tindakan dalam mencapai tujuan kelompok yang diinginkan atau yang telah disepakati bersama antara pimpinan dan bawahannya.

2. Teori Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan adalah suatu sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menghadapi bawahannya, mengatur suatu sistem operasional organisasi, menjalankan serta mengawal kebijakan, dan juga menyelesaikan masalah baik secara internal maupun eksternal. Gaya kepemimpinan merupakan ketika seorang pemimpin memiliki sekumpulan ciri khas yang digunakan pemimpin secara terlihat maupun tidak yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi bawahannya agar terwujudnya tujuan

bersama yang telah disepakati. Gaya kepemimpinan juga dapat ditunjukkan dengan perilaku pemimpin saat berkomunikasi, memberikan suatu informasi serta perintah kepada bawahannya (Rivai, 2003).

Gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin dapat mempengaruhi kesuksesan pegawai dalam berprestasi. Dua tugas utama dari seorang pemimpin adalah menyelesaikan tugas dan menjaga hubungan yang efektif, dimana dua tugas utama ini diintegrasikan menjadi tiga hal yaitu tuntutan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, membangun dan menjaga semangat dari kelompok, serta tuntutan terhadap individu untuk menyeimbangkan antara tuntutan individu, tugas, dan kelompok (Sunarto, 2005).

Menurut (Rivai, 2003) gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar yaitu sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan yang berpola kepada kepentingan atas pelaksanaan tugas.
2. Gaya kepemimpinan yang berpola kepada pelaksanaan hubungan kerja sama.
3. Gaya kepemimpinan yang berpola kepada kepentingan atas hasil yang dicapai.

Beberapa ahli mengemukakan pendapat mengenai gaya kepemimpinan. Adapun gaya kepemimpinan yang sering kita temui saat ini adalah sebagai berikut:

1. Gaya Kepemimpinan Otokratis

Otokrat berasal dari bahasa Yunani, *autos* yang berarti sendiri sedangkan *kratos* yang berarti kekuasaan atau kekuatan. Kepemimpinan otokratis berarti pemimpin yang menuntut para bawahannya untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemimpin tanpa memperdulikan kebutuhan karyawannya. Model kepemimpinan ini dimana seorang pemimpin meninstruksikan secara langsung kepada orang-orang yang dipimpinnya. Artinya adalah bawahan tidak diperkenankan untuk membantah, mengkritik, hal ini dianggap karena bawahan bersalah dan tradisional. Pemimpin otokratis cenderung merasa bahwa mereka mengetahui apa yang mereka butuhkan. Otokrasi merupakan pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang berkuasa secara penuh dan tidak terbatas masanya. Sedangkan yang memegang kekuasaan disebut dengan otokrat yang biasanya dijabat oleh pemimpin yang berstatus sebagai raja atau yang menggunakan sistem kerajaan.

Menurut (Siagian, 2003) Adapun ciri-ciri dari kepemimpinan otokratis sebagai berikut:

- a. Pemimpin otokratis merupakan pemimpin yang egois.
- b. Pembenaan segala cara ditempuh untuk tercapainya suatu tujuan.

- c. Suatu organisasi sebagai bentuk kepemilikan pribadi yang dapat diperlakukan dengan sesukanya.
- d. Adanya kecenderungan melakukan para bawahan sama dengan seperti alat lain atau mesin dalam organisasi.
- e. Adanya pengabaian peranan seorang bawahan dalam proses pengambilan suatu keputusan.
- f. Menuntut ketaatan penuh dari para bawahannya.
- g. Bernada keras dalam pemberian suatu intruksi atau perintah.

Berdasarkan ciri-ciri diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan otokratis memiliki serangkaian karakteristik yang dapat dipandang sebagai karakteristik yang negatif. Dalam sistem pemerintahan monarki absolut atau sistem kediktatoran, otorianisme dan absolutisme sangat melekat pada seorang raja dalam menangani dan menjalankan roda pemerintahannya. Otoritas, kewenangan ada ditangan raja, tiran, diktator, dan penguasa otoriter.

2. Gaya Kepemimpinan Militeristik

Gaya kepemimpinan bertipe ini adalah pemimpin dalam menggerakkan bawahannya lebih sering menggunakan sistem perintah, senang bergantung terhadap pangkat dan jabatannya, serta senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan. Menuntut adanya kedisiplinan yang tinggi serta kaku dari bawahannya, dan susah untuk menerima kritikan dari bawahannya. Gaya kepemimpinan

semacam ini mengikuti garis komando militer secara hirarkis. Apa yang digariskan, diperintahkan dan dikomandokan dari atasan atau pimpinan kepada bawahan harus dilaksanakan dari atasan atau pimpinan kepada bawahan harus dilaksanakan. Cara, tipe, praktik dan gaya kepemimpinan seperti ini memang cocok untuk diberlakukan dan diterapkan pada kalangan militer atau tentara. Jelas sekali bahwa tipe kepemimpinan militer ini tidak pas dan tidak sesuai apabila dipakai dalam sistem pemerintahan sipil.

Menurut (Kartono, 2008) sifat-sifat gaya kepemimpinan militeristik yaitu sebagai berikut:

- a. Cenderung lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando terhadap bawahannya, bersifat kaku, dan sering kali kurang bijaksana.
- b. Menghendaki keputusan dan kepatuhan mutlak terhadap bawahannya.
- c. Menuntut terhadap kedisiplinan, keras serta kaku dari para bawahannya.
- d. Tidak menghendaki saran, usul, sugesti, dan kritikan-kritikan dari para bawahannya.
- e. Cenderung menggunakan komunikasi satu arah saja.

3. Gaya Kepemimpinan Demokratis

Gaya kepemimpinan demokratis diartikan sebagai pemimpin yang memberikan secara luas kepada para bawahannya. Apabila terdapat suatu permasalahan akan selalu mengikutsertakan bawahannya sebagai satu tim yang utuh. Pemimpin mampu menggerakkan bawahannya secara efisien, serta mampu memberikan pengarahan yang efisien. Biasanya gaya kepemimpinan ini memiliki ciri-ciri yaitu organisasi beserta bagiannya dapat berjalan secara lancar, walaupun pemimpin tidak mendampingi secara langsung. Gaya kepemimpinan ini mengutamakan kesejahteraan, kelancaran kerja sama dari setiap tim, sehingga seorang pemimpin mampu menjadi komponen yang fundamental dalam mempercepat dinamisme dan kerja sama demi tercapainya tujuan organisasi dengan cara yang paling cocok dengan jiwa kelompok dan situasinya.

Menurut (Rivai, 2003) ciri-ciri dari gaya kepemimpinan demokratis adalah sebagai berikut:

- a. Pemimpin yang demokratis cenderung memandang perannya sebagai koordinator dari berbagai unsur dan komponen organisasi sehingga bergerak sebagai mestinya.
- b. Pemimpin dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya menggunakan pendekatan yang holistik dan integralistik.

- c. Pemimpin yang demokratis memperlakukan manusia dengan cara yang manusiawi.
- d. Dalam hal menindaklanjuti para bawahannya yang melanggar disiplin dan etika kerja yang disepakati biasanya menggunakan pendekatan yang bersifat korektif dan edukatif.
- e. Pemimpin akan mendengarkan pendapat, saran bahkan kritikan dari orang lain, terutama dari bawahannya.
- f. Pemimpin akan selalu menunjukkan penghargaannya kepada para bawahannya yang memiliki prestasi.

Menurut para ahli, gaya kepemimpinan ini adalah tipe yang paling ideal. Walaupun secara umum pada kenyataannya kepemimpinan yang demokratis tidak selalu merupakan pemimpin yang paling efektif, karena ada kalanya dalam hal bertindak dan pengambilan keputusan bisa terjadi keterlambatan sebagai akibat dari konsekuensi keterlibatan para bawahan dalam proses pengambilan suatu keputusan.

Menurut (Sudriamunawar, 2006) ada tiga gaya kepemimpinan yaitu sebagai berikut:

1. Gaya Kepemimpinan Otokratis

Merupakan tipe kepemimpinan dimana seorang pemimpin memberikan perintah secara langsung kepada orang-orang yang

dipimpinnya atau bawahannya. Biasanya tipe kepemimpinan ini menganggap bahwa mereka memahami dan mengetahui atas apa yang mereka butuhkan.

2. Gaya Kepemimpinan Partisipatif

Pada kepemimpinan ini seorang pemimpin biasanya menggunakan pola secara demokrasi, artinya adalah adanya keterlibatan dari para bawahan pada proses pengambilan suatu keputusan yang akan lebih memungkinkan sebagai suatu akibat dari mempunyai komitmen yang jauh lebih besar pada sasaran dan tujuan organisasi, yang bukan berarti seorang pemimpin menyerahkan begitu saja dalam perumusan keputusan disuatu organisasi tersebut, akan tetapi seorang pemimpin partisipatif juga ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman dari para bawahannya.

3. Gaya Kepemimpinan Kendali Bebas

Tipe kepemimpinan ini juga disebut *Laissez Faire*. Pada gaya kepemimpinan ini dimana seorang pemimpin tidak menunjukkan pimpinan secara langsung, namun bukan berarti tidak ada pemimpin sama sekali. Seorang pemimpin tidak berpartisipasi sedikitpun dalam kegiatan para anggotanya. Semua tanggung jawab serta pekerjaan harus dilakukan oleh bawahannya sendiri. Seorang pemimpin mempunyai pandangan bahwa organisasi akan berjalan lancar secara semestinya dan sendirinya karena pada anggota yang ada dalam

organisasi terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa dimana sudah mengetahui dan memahami apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut. Para anggota organisasi boleh saja bertindak sesuai dengan keyakinannya asal saja kepentingan bersama tetap terjaga dan tujuan organisasi dapat tetap tercapai.

Menurut (Riggio E. Ronald dan M. Bernard Bass, 2006) terdapat dua macam gaya kepemimpinan adalah sebagai berikut:

1. Gaya Kepemimpinan Transaksional

Dalam gaya kepemimpinan ini berdasarkan dari prinsip transaksi atau pertukaran antara pimpinan dan juga bawahan. Seorang pemimpin akan memberikan imbalan atau penghargaan tertentu kepada bawahannya apabila bawahan dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh pemimpin. Pola hubungan yang dibangun dan dikembangkan didasarkan pada sistem timbal balik atau transaksi yang sangat menguntungkan (*mutual system of reinforcement*), artinya seorang pemimpin memahami atas kebutuhan dasar dari para anggotanya dan pemimpin menemukan penyelesaian atas cara kerja dari para anggotanya.

2. Gaya Kepemimpinan Transformasional

Dalam gaya kepemimpinan ini dimana nilai-nilai dari para anggota yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran dari anggota tentang masalah etis serta untuk memobilisasi energi dan sumber daya manusia untuk mereformasi suatu institusi. Gaya kepemimpinan ini hadir

untuk menjawab dari tantangan zaman yang penuh dengan perubahan. Tipe kepemimpinan ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan akan penghargaan diri, akan tetapi untuk menumbuhkan kesadaran para pemimpin untuk berbuat yang terbaik sesuai dengan kajian perkembangan manajemen dan kepemimpinan yang memandang manusia, kinerja, serta perubahan suatu organisasi adalah sisi yang paling berpengaruh.

Menurut (Kartono, 2008) terdapat beberapa gaya kepemimpinan adalah sebagai berikut:

1. Gaya Kepemimpinan Paternalistik

- a. Seorang pemimpin beranggapan bawahan adalah sebagai manusia yang tidak atau belum dewasa atau sebagai anak sendiri yang perlu untuk dikembangkan.
- b. Pemimpin terlalu bersikap melindungi (*overly protective*).
- c. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri.
- d. Hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif.
- e. Tidak memberikan atau hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan gaya kreatifitas mereka sendiri.

2. Gaya Kepemimpinan Karismatik

Pada gaya kepemimpinan ini dimana seorang pemimpin memiliki suatu daya tarik serta pembawaan diri dapat mempengaruhi orang lain. Daya tarik inilah yang pada akhirnya membuat banyaknya pengikut yang dalam jumlah besar serta pengawal-pengawal yang dapat dipercaya. Seorang pemimpin memiliki daya tarik tersendiri serta memiliki energi yang sedemikian dianggap memiliki suatu kemampuan yang superhuman, sehingga sering kali orang tidak mengetahui alasan kenapa pemimpin tersebut begitu dapat dikagumi. Biasanya pemimpin bertipe ini memiliki inspirasi, keberanian dan juga keyakinan teguh akan pendirian diri sendiri. Totalitas dari kepribadian pemimpin inilah yang menjadikan pengaruh dan daya tarik yang teramat besar kepada para pengikut.

3. Gaya Kepemimpinan Otokratis

Pada kepemimpinan tipe ini didasarkan kepada kekuasaan serta paksaan yang mutlak harus dipatuhi. Seorang pemimpin dengan gaya sedemikian akan cenderung kepada *one-show man*. Orientasinya sebagai raja, pemerintah serta dalam pengambilan keputusan tidak melibatkan dan mempertimbangkan dari bawahan. Komunikasi yang digunakan dalam penyampaian suatu

informasi tidak dilakukan secara detail. Pemimpin bertipe ini selalu ingin berkuasa secara absolut, tunggal serta ingin merajai.

4. Gaya Kepemimpinan *Laissez Faire*

Gaya kepemimpinan ini sering dikenal dengan istilah gaya kepemimpinan kendali bebas. Tipe kepemimpinan ini seorang pimpinan menyerahkan semua tanggungjawab kepada para bawahannya. Keterlibatannya sebagai seorang pemimpin sangatlah minim bahkan cenderung tidak ada. Hal ini dapat terjadi karena seorang pemimpin yang demikian tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Posisi yang didapatkan berdasarkan penyuapan atau nepotisme, sehingga pemimpin ini sebenarnya tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin, bawahan yang tidak terkontrol, sehingga membuat para bawahan menjadi bekerja sesuai dan sesuka hati mereka sendiri.

5. Gaya Kepemimpinan Militeristik

Kepemimpinan gaya ini sering kali dianggap ingin menyerupai gaya militer, akan tetapi sebenarnya tipe kepemimpinan ini lebih bersifat kepada otoriter. Adapun sifat-sifat dari gaya kepemimpinan militeristik adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan sistem komando yang bersifat keras dan juga kaku terhadap bawahannya.

- b. Pemimpin menghendaki atas keputusan mutlak terhadap bawahannya.
- c. Cenderung menyukai acara-acara formalitas, upacara-upacara dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan.
- d. Adanya tuntutan kepada para bawahan agar disiplin akan tetapi cenderung dengan cara yang keras dan juga kaku.
- e. Tidak adanya penerimaan terhadap saran, usul, serta kritikan dari para bawahannya.
- f. Komunikasi yang digunakan adalah komunikasi satu arah.

6. Gaya Kepemimpinan Populistis

Dalam gaya kepemimpinan biasanya kepemimpinan yang masih bersifat kepada tradisional, nasionalisme terlebih diperkuat dengan sikap yang berhati-hati kepada kolonialisme, penindasan, penghisapan, serta penguasaan oleh kekuatan-kekuatan asing (negara luar). Kepemimpinan ini dapat membangun dan membangkitkan solidaritas rakyat atau masyarakat. Kepemimpinan yang berpegang teguh kepada nilai-nilai masyarakat yang tradisional, juga kurang mempercayai dukungan kekuatan dan juga bantuan-bantuan luar negeri. Tipe kepemimpinan ini lebih mengutamakan kepada penghidupan kembali terhadap sikap nasionalisme.

7. Gaya Kepemimpinan Demokratis

Pemimpin dalam tipe ini merupakan pemimpin yang mampu untuk menggerakkan para bawahannya secara efektif dan efisien, serta mampu memberikan pengarahan yang baik. Kepemimpinan tipe ini memiliki ciri-ciri organisasi dan juga bagiannya dapat berlangsung secara lancar, walaupun seorang pemimpin tidak mendampingi secara langsung. Tipe gaya kepemimpinan ini yang melibatkan para bawahan dengan demikian para bawahan sadar akan tugas dan kewajiban yang dimilikinya, dengan demikian

8. Gaya Kepemimpinan Administratif atau Eksekutif

Pada kepemimpinan bertipe ini lebih kepada menunjukkan suatu keterampilan dalam penyelenggaraan administrative secara efektif. Dengan demikian akan dapat menghasilkan sistem administrasi dan birokrasi yang lebih efisien untuk memantapkan integritas bangsa pada khususnya, dan usaha pembangunan pada umumnya. Orientasinya adalah kepada kemodernan serta pemanfaatan pada teknologi, yang tidak lain tujuan dari tipe kepemimpinan ini adalah manajemen yang lebih bersifat kepada modern.

Menurut (Donni Juni Priansa dan Suwantno, 2011) gaya kepemimpinan dibagi menjadi empat tipe antara lain sebagai berikut:

a. Gaya Kepemimpinan Karismatik

Pada gaya kepemimpinan ini seorang pemimpin menampilkan atau terlihatnya kepribadian dari seorang pemimpin. Tipe pemimpin yang simbolis, pesan-pesan mengenai terhadap visi dan misi, memberikan inspirasi, serta menggunakan komunikasi non verbal. Daya tarik terhadap suatu ideologi, stimulasi pada intelektual terhadap para bawahan oleh pemimpin serta penampilan yang percaya diri untuk kinerja yang melampaui atas tanggungjawab dari tugas.

b. Gaya Kepemimpinan Transaksional

Dalam kepemimpinan gaya ini akan lebih menfokuskan kepada transaksi antar pribadi, antara manajemen dan anggota, setidaknya terdapat dua karakteristik yang menjadi landasan dari gaya kepemimpinan transaksional yaitu:

1. Pemberian suatu penghargaan dari pimpinan kepada anggotanya, yang dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi kepada anggotanya.
2. Pimpinan akan melakukan koreksi kepada bawahan apabila bawahan melakukan suatu kesalahan.

c. Gaya Kepemimpinan Tim

Maksudnya adalah terdapat suatu kepandaian untuk dapat memajemen dalam kesabaran untuk penyampaian suatu informasi, adanya kepercayaan kepada orang lain, menghapuskan sistem otoriter, serta memahami kapan harus adanya intervensi.

d. Gaya Kepemimpinan Visioner

Tipe kepemimpinan ini adalah kemampuan untuk menekan dan juga mengekspresikan suatu visi yang realistis, dapat dipercaya, atraktif terhadap masa depan dari suatu organisasi yang terus tumbuh dan berkembang.

Tabel 1.2 Gaya Kepemimpinan Berdasarkan Para Ahli

No	Nama Ahli	Gaya Kepemimpinan
1.	Sondang P Siagian	Gaya Kepemimpinan Otokrasi
2.	Veithzal Rivai	Gaya Kepemimpinan Demokrasi
3.	Haryono Sudriamunawar	a. Gaya Kepemimpinan Otokrasi b. Gaya Kepemimpinan Partisipatif c. Gaya Kepemimpinan Laissez Faire (Kendali Bebas)
4.	Riggio E. Ronald dan M. Bernard Bass	a. Gaya Kepemimpinan Transaksional b. Gaya Kepemimpinan Transformasional
5.	Kartini Kartono	a. Gaya Kepemimpinan Militeralistik b. Gaya Kepemimpinan Paternalistik c. Gaya Kepemimpinan Karismatik d. Gaya Kepemimpinan Otokrasi e. Gaya Kepemimpinan Laissez Faire (Kendali Bebas) f. Gaya Kepemimpinan Populistik g. Gaya Kepemimpinan Demokratis h. Gaya Kepemimpinan Administratif dan Eksekutif

6.	Donni Juni Priansa dan Suwatno	a. Gaya Kepemimpinan Karismatik b. Gaya Kepemimpinan Transaksional c. Gaya Kepemimpinna Tim d. Gaya Kepemimpinan Visioner
----	--------------------------------	--

Diolah Penulis

3. Teori Presiden

Presiden dalam bahasa Latin disebut *Presidere* yang merupakan berasal dari kata *prae* yang memiliki arti di depan dan kata *sedere* yang memiliki arti duduk. Pada saat ini presiden selalu dikenal dengan sebutan kepala negara. Di negara Indonesia seorang presiden berperan sebagai kepala pemerintahan yang mana dalam Undang-Undang Dasar, berkak untuk mengajukan suatu usulan rancangan Undang-Undang kepada DPR, menetapkan dari peraturan pemerintah dengan tujuan untuk menjalankan suatu undang-undang agar berjalan sebagaimana mestinya. Sejak terjadinya reformasi, rakyat Indonesia berhak untuk memilih presiden dan wakil presiden dengan melalui pemilihan umum presiden. Artinya di Indonesia, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia selama lima tahun untuk satu kali periode. Selanjutnya jika ingin melanjutkan kedua periode maka harus melalui proses pemilihan langsung kembali, seperti yang dilakukan sebelumnya pada periode pertama.

Kewenangan presiden telah dimuat dalam Undang-Undang Dasar. Pengaturan kewenangan ini memiliki peran sebagai batas-batas dari kewenangan presiden gar tidak bertindak sesuai dengan kehendaknya.

Kewenangan presiden dalam setiap negara berbeda-beda, kewenangan ini akan disesuaikan dengan konstitusi atau undang-undang yang dianut oleh setiap negara. Diaturinya kewenangan seorang presiden didalam undang-undang dimaksudkan sebagai gerakan untuk mengatur serta membatasi suatu kekuasaan dari kepala pemerintahan yang dapat menyebabkan tindakan diktator. Maka dengan demikian diperlukannya suatu konstitusi atau undang-undang yang dimaksudkan untuk mengatur dan membatasi dari kekuasaan tersebut. Seperti yang diungkap oleh Lord Acton "*Power tends to corup and absolute power corrupts absolutely* (Kekuasaan selalu cenderung berkembang menjadi sewenang-wenang dan kekuasaan bersifat mutlak cenderung mutlak pada kewenangannya)" (Assiddiqie, 2004). Beberapa kewenangan presiden menurut undang-undang dari berbagai negara antara lain sebagai berikut:

- a. Kewenangan pada penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini biasa disebut sebagai kewenangan bersifat eksekutif. Semua urusan pemerintahan harus berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kewenangan untuk mengatur kepentingan umum dan publik, atau dikenal dengan sebutan kewenangan bersifat legislatif. Dalam kewenangan ini adanya pemisahan tugas, kewenangan legislatif ini terdapat pada lembaga perwakilan bukan pada lembaga eksekutif.

- c. Kewenangan pada judicial dalam pemulihan keadilan yang berkaitan dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi suatu hukuman, memberi pengampunan atau untuk menghapus tuntutan yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan. Pada sistem presidensill kewenangan untuk memberikan grasi, abolisi dan amnesti berada pada tangan presiden.
- d. Kewenangan pada urusan diplomatik, bagian untuk menjalankan hubungan dengan negara lain atau hubungan internasional lainnya. Merupakan rangkaian dari konteks hubungan politik luar negeri baik dalam keadaan damai ataupun perang.
- e. Kewenangan bersifat administratif untuk mengangkat serta memberhentikan orang-orang yang ada dalam jabatan kenegaraan atau jabatan administrasi negara. Hal ini dikarenakan presiden adalah kepala eksekutif dengan demikian sudah seharusnya memiliki hak untuk mengangkat serta memberhentikan orang-orang yang ada dalam jabatan pemerintahan atau administrasi negara.

Lima kewengan tersebut sifatnya masih sangat general dan luas cakupannya, maka dari itu perlu diatur kembali dalam undang-undang, oleh karena itu akan ditentukan dengan:

- a. Penyelenggaran pemerintahan oleh presiden harus berdasarkan undang-undang dasar.

- b. Dalam pembagian kekuasaan harus terdapat *chek and balance*. Maka dari itu pemerintah hanya dapat menetapkan peraturan yang sifatnya untuk kepentingan umum dan publik. Untuk undang-undang dan produk hukum lainnya akan ditetapkan oleh parlemen. Satu-satunya alasan yang dapat dijadikan pembenaran lembaga pemerintah untuk menetapkan suatu peraturan hanyalah jika peraturan tersebut dibutuhkan untuk mengatur kepentingan internal organisasi yang bersangkutan, atau untuk kepentingan untuk mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan amanat undang-undang. Diluar konteks tersebut, pemerintah atau aparat pemerintah dilarang mengatur kepentingan umum dan publik, kecuali hal tersebut telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang yang melibatkan peranan parlemen.
- c. Pada sistem pemerintahan parlementer, adanya pemisahan jabatan antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Kepala negara memiliki wewenang untuk memberikan grasi, dan abolisi. Amnesti diberikan untuk kepentingan memulihkan keadilan terhadap dampak dari penderitaan yang ditimbulkan atas putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti secara hukum dalam proses peradilan sebelumnya. Akan tetapi dalam sistem pemerintahan presidensill, presiden berperan sebagai

kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Kewenangan presiden untuk memberikan grasi, abolisi, dan amnesti, presiden terlebih dahulu harus mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat.

- d. Dalam hubungan diplomatik antar negara ataupun berkaitan dengan hukum internasional, wakil dari setiap negara adalah presiden. Untuk membatasi agar presiden tidak melakukan perjanjian yang dapat merugikan negara atau kepentingan rakyat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat (perlemen).
- e. Kewenangan bersifat administratif juga harus diatur, seringkali pengangkatan dan pemberhentian jabatan dianggap sebagai hak mutlak presiden atau lebih sering dikenal dengan istilah hak prerogatif presiden. Walaupun kedudukan presiden dianggap sebagai sentral, namun pelaksanaan tugas-tugasnya dalam bidang administratif juga harus tetap diatur dalam undang-undang.

F. Definisi Konseptual

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang disebut dengan pemimpin, dimana seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk dapat mempengaruhi serta mengarahkan kelompok yang

terorganisir agar dapat bekerja secara baik dan maksimal demi terwujudnya suatu tujuan dari organisasi yang telah disepakati sebelumnya. Kepemimpinan salah satu unsur fundamental dalam menghadapi perilaku dan gaya seseorang, hal ini memiliki tujuan agar seorang bawahan mampu dan mau patuh terhadap pimpinan.

2. Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan adalah suatu tindakan atau sikap dari seorang pemimpin terhadap bawahannya. Gaya kepemimpinan dalam makna lain dapat diartikan sebagai keterampilan atau strategi yang selalu dilakukan oleh seorang pimpinan dalam mengarahkan, mendorong, atau mempengaruhi bawahannya untuk dapat melakukan tugas secara sadar dan sukarela demi terwujudnya dan tercapainya suatu tujuan bersama dari suatu organisasi.

3. Presiden

Presiden adalah nama jabatan resmi untuk seorang kepala negara. Pada negara yang menganut sistem presidensill seperti Indonesia, presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh wakil presiden dan juga menteri-menteri dalam kabinetnya, tugas presiden sendiri telah diatur dalam undang-undang.

G. Definisi Operasional

Berdasarkan teori diatas, penulis merujuk pada indikator yang terdapat dalam teori Veithzal Rivai dimana Gaya Kepemimpinan Demokratis dapat diukur dengan indikator:

- a. Berperan sebagai koordinator dari berbagai unsur dan komponen organisasi
- b. Menggunakan pendekatan holistik dan integralistik
- c. Memperlakukan manusia dengan cara yang manusiawi
- d. Dalam menindaklanjuti bawahan yang melanggar disiplin dan etika kerja menggunakan pendekatan yang bersifat korektif dan edukatif
- e. Mendengarkan pendapat, saran dan kritikan
- f. Menunjukkan penghargaan kepada bawahan yang memiliki prestas

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat memahami suatu peristiwa yang terjadi pada subjek penelitian dalam konteks yang ilmiah. Konteks khusus yang dimaksud adalah bagaimana perbandingan gaya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam perspektif kepemimpinan demokratis.

2. Objek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada objek penelitian Dewan Pimpinan Daerah Partai PDIP Yogyakarta dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Yogyakarta. Lokasi ini dipilih dikarenakan berdasarkan penelitian yang akan diambil oleh penulis.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan segala informasi yang terkait dengan konsep penelitian ataupun yang terkait dengan penelitian yang didapatkan atau diperoleh secara langsung dari sumber melalui wawancara atau interview dan observasi (responden dan informan). Informan ini harapannya dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk dapat melengkapi atas jawaban dari reponden.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari dokumen-dokumen atau laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian. Sumber tertulis terbagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber arsip dokumen pribadi dan dokumen resmi (Sugiono, 2015).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua orang atau lebih secara langsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuannya adalah untuk

mendapatkan suatu informasi yang tepat dari narasumber terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.

Data penelitian ini didapatkan dari wawancara langsung dengan:

1. Kepala DPD Partai PDIP DIY
2. Kepala DPD Partai Demokrat DIY
3. Ketua HMI MPO Cabang Yogyakarta
4. Ketua KAMMI Cabang Yogyakarta
5. Ketua GMNI Cabang Yogyakarta

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari tulisan, buku, dan sebagainya. Dokumentasi merupakan suatu aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, dan penyediaan dokumen dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan, pengetahuan dan bukti-bukti yang akurat.

5. Unit Analisa

Adapun unit analisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. DPD Partai PDIP DIY
2. DPD Partai Demokrat DIY
3. Pergerakan Mahasiswa

- a. HMI MPO Cabang Yogyakarta
- b. KAMMI Cabang Yogyakarta
- c. GMNI Cabang Yogyakarta

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Ketika wawancara sedang berlangsung dan peneliti merasa jawaban dari narasumber terkait masih belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi. Selain itu analisis mendalam dilakukan setelah selesai pengumpulan data baik secara primer maupun sekunder. Berikut langkah-langkah analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan terkait dengan Komparasi Gaya Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo Dalam Perspektif Kepemimpinan Demokratis :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan data yang diperoleh di lapangan kemudian dilakukan pemilihan secara terperinci dan dirangkum yang menurut peneliti penting dan fokus pada permasalahan yaitu terkait dengan Komparasi Gaya Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo Dalam Perspektif Kepemimpinan Demokratis. Dengan kata lain reduksi data ialah menyeleksi atau memfokuskan data kasar di lapangan yang telah di dapat. Data kasar

yang dimaksudkan adalah keterangan-keterangan atau informasi yang tidak relevan dengan permasalahan terkait dengan Komparasi Gaya Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo Dalam Perspektif Kepemimpinan Demokratis sehingga perlu direduksi.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dari hasil reduksi data, penyajian data diantaranya seperti mendisplaykan data dalam bentuk laporan sistematis dan mudah dibaca. Penyajian data sebagai contohnya seperti bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya.

c. Pengambilan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan mengacu pada reduksi data yang telah sesuai dengan rumusan masalah. Dalam penarikan kesimpulan penelitian kualitatif ini ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu dapat menjawab rumusan masalah sejak awal dan tidak bisa menjawab rumusan masalah yang ditentukan di awal, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu, kerangka dasar teori, definisi konseptual, definisi operasional, dan metode penelitian.

BAB II Deskriptif Objek Penelitian pada bab ini akan memaparkan sejarah singkat dari Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan akan memaparkan profil singkat presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dimulai dari masa kecil, perjalanan karir hingga dinamika saat menjabat sebagai presiden Indonesia.

BAB III Hasil Pembahasan pada bab ini akan memaparkan semua hasil dari kegiatan penelitian tentang perbandingan gaya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam perspektif kepemimpinan demokratis.

BAB IV Penutup pada bab ini akan memaparkan kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil kegiatan penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran